



Efektivitas ASEAN dalam Implementasi *Five-Point Consensus* pada Konflik Myanmar–Rohingya

Hartini Runga¹, Roberto O.C. Seba², Novriest Uumbu Walangara Nau³

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia, hartinirunga@gmail.com

²Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia, robert.seba@uksw.edu

³Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, Indonesia, Novriest.umbu@uksw.edu

Corresponding Author: hartinirunga@gmail.com¹

Abstract: *The Myanmar–Rohingya conflict has become a regional humanitarian crisis that challenges ASEAN's credibility as a regional organization. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Five-Point Consensus, which was agreed upon by ASEAN in April 2021 in response to the crisis in Myanmar. The method used is descriptive qualitative, with secondary data sources consisting of scientific journals, international organization reports, and official ASEAN documents. The results indicate that the implementation of the Five-Point Consensus remains far from expectations. The main obstacles lie in ASEAN's principle of non-intervention, the weak commitment of the Myanmar military junta, and the dynamics of member states' interests divided between hard and soft approaches. Despite support from several member states, such as Indonesia and Malaysia, the policy's implementation has not resulted in significant changes on the ground, particularly regarding the cessation of violence and the protection of human rights. Thus, ASEAN's effectiveness remains limited to a symbolic and diplomatic role without a binding enforcement mechanism. This study emphasizes the importance of reforming ASEAN's basic principles to respond to humanitarian crises more decisively and effectively.*

Keywords: *ASEAN, Myanmar, Rohingya, Five-Point Consensus, effectiveness*

Abstrak: Konflik Myanmar–Rohingya telah menjadi isu krisis kemanusiaan regional yang menantang kredibilitas ASEAN sebagai organisasi kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi *Five Point Consensus* yang disepakati ASEAN pada April 2021 sebagai respon terhadap situasi Myanmar. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, laporan organisasi internasional, serta dokumen resmi ASEAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *Five Point Consensus* masih jauh dari harapan. Hambatan utama terletak pada prinsip non-intervensi ASEAN, lemahnya komitmen junta militer Myanmar, serta dinamika kepentingan negara anggota yang terbagi antara pendekatan keras dan lunak. Meskipun terdapat dukungan dari beberapa negara anggota, seperti Indonesia dan Malaysia, implementasi kebijakan tidak menghasilkan perubahan signifikan di lapangan, khususnya terkait penghentian kekerasan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, efektivitas ASEAN masih terbatas pada

peran simbolis dan diplomatik tanpa mekanisme penegakan yang mengikat. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi prinsip dasar ASEAN agar mampu merespons krisis kemanusiaan secara lebih tegas dan efektif.

Kata Kunci: ASEAN, Myanmar, Rohingya, *Five Point Consensus*, efektivitas

PENDAHULUAN

Myanmar adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang bersebelahan dengan beberapa negara di sebelah barat yaitu India dan Bangladesh, di sebelah timur yaitu Thailand dan Laos, di sebelah utara dan timur laut yaitu Tiongkok. Etnis-etnis tersebut antara lain Bamar beragama Buddha, Karen beragama Buddha dan Kristen, Kayah beragama Buddha yang memiliki keterkaitan dengan etnis Thailand, Kayah beragama Buddha yang berkaitan dengan etnis Thailand, Arakan beragama Buddha, Mon beragama Buddha, Kachin beragama Kristen, Chin beragama Kristen dan yang terakhir Rohingya sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecilnya Hindu (Kompas, 2023) Pada tahun 2017 terjadi konflik antara etnis Rohingya dan etnis lainnya. Hal ini dilatar belakangi oleh sentimen agama, namun disisi lain kepentingan politik dan ekonomi juga menjadi salah satu penyebabnya. Ada beberapa faktor juga yang membuat Etnis Rohingya tidak diinginkan oleh etnis lainnya. Faktor-faktor tersebut yaitu diantara etnis lainnya Rohingya memiliki status yang berbeda dan minoritas dari etnis lainnya, Rohingya dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh, dalam hal perekonomian etnis Burma tidak ingin bersaing, dan yang terakhir adalah adanya kecemburuan dari etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya.

Terlihat jelas perlakuan diskriminatif dari pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya pada tahun 2000 mulai dari penyitaan tanah yang digunakan untuk membangun perumahan masyarakat beragama Buddha. Pada tahun 2012 terjadi pembakaran besar-besaran terhadap rumah etnis Rohingya dan ternyata hal ini juga di provokasi oleh pihak Tentara dan Polisi dari Myanmar. Hal ini disebabkan karena Myanmar adalah salah satu anggota dari ASEAN. ASEAN selaku organisasi di kawasan telah banyak melakukan berbagai upaya untuk mencari solusi terbaik namun, pada dasarnya sulit untuk diselesaikan dan jumlah korban yang terus menerus meningkat. Beberapa upaya yang telah dilakukan ASEAN adalah dengan dibuatnya five point consensus.

Five-Point Consensus merupakan bentuk inisiasi dan solusi yang diberikan oleh anggota ASEAN kepada Myanmar yang didukung oleh aktor internasional seperti PBB, Negara China, Amerika Serikat dan Australia. *Five-Point Consensus* ini dibuat untuk menyejahterakan masyarakat Myanmar serta menjaga keamanan di kawasan Asia Tenggara namun, yang paling penting adalah five point consensus ini diharapkan bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar. Beberapa ahli dari Asia dan memberikan pendapat mengenai five point consensus yaitu David Scoot Mathieson dan Mortne B. Menurut Mathieson, five point consensus diprediksi pendek dan hanya menjadi semacam panjangan yang disebabkan oleh janji-janji keterlibatan yang tidak jelas. ASEAN hampir sepenuhnya tidak efektif untuk melibatkan Myanmar dalam permasalahan politik, kemanusiaan dan hak asasi manusia semenjak diakui sebagai anggota ASEAN pada tahun 1997.

Five point consensus pada prinsipnya memberi ASEAN peran realistis dan sangat bermakna dalam mengatasi krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Five point consensus yang dibuat oleh ASEAN telah gagal memenuhi janjinya atau mengambil langkah-langkah untuk menekan junta militer untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menganalisis efektivitas dari five point consensus yang dilakukan oleh ASEAN, para tokoh dari institusionalis cenderung fokus pada faktor eksternal dan internal yaitu komitmen dari para pihak yang terlibat. Tujuan utama dari five point consensus adalah untuk mewujudkan

perdamaian di kawasan regional Asia Tenggara. Namun, salah satu dari bagian ini membuat ASEAN kesulitan untuk mewujudkan perdamaian di Myanmar. Ketika Brunei menjabat sebagai ketua ASEAN 2021, mereka mengambil tindakan simbolis yaitu melarang Myanmar untuk melakukan pertemuan, namun tidak ada tekanan yang signifikan dari ASEAN membuat Myanmar menjadi lebih lemah lembut dan Naypydaw juga menjadi salah satu penghalang bagi ASEAN. Namun, Hun Sen berpendapat bahwa peningkatan kekejaman rezim di Myanmar tidak seharusnya diabaikan dengan alasan kebijakan ekonomi, pengungsi, dan kesehatan yang berpengaruh bagi wilayah tersebut (Joshua Kurlantzick, 2021). Bergulirnya kepemimpinan juga menjadi salah satu hal yang membuat five point consensus di Myanmar sulit dilakukan oleh ASEAN. Five Point Consensus dianggap belum efektif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar. Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh peneliti Asia Pacific Studies, Jhon Dosch yang mengatakan bahwa ASEAN salah satu organisasi yang terlihat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengandalkan data sekunder sebagai acuan dalam menjelaskan keberhasilan ASEAN dalam menyelesaikan Konflik yang terjadi di Myanmar dengan menggunakan Five Point Consensus. Data sekunder yang disajikan dalam penelitian ini dibutuhkan karena, penulis secara terbatas oleh dana dan juga waktu untuk menyajikan data di wilayah lain yang mengalami perang, hal ini dikarenakan jarak maupun letak geografis di Myanmar yang terpisah antara negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (Library reseach) yaitu dengan cara mengkaji dan mempelajari buku-buku, artikel jurnal ilmiah, situs-situs berita online, surat kabar terkemuka, situs-situs web pemerintah, dan lain sebagainya baik melalui metode ebrbasis dokumen maupun metode berbasis internet yang ada hubungannya dengan judul proposal ini. Penelitian ini menggunakan analisis data eksplanatif berdasarkan analisis korelasional yaitu metode analisis hubungan kausalitas diantara unit eksplanasi dan unit analisis yang berada pada tingkat analisis yang sama, proposal ini akan mengkaji bagaimana “Implementasi Efektivitas ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Myanmar-Rohingya dengan Five Point Consensus”. Untuk meneliti tentang Implementasi Efektivitas ASEAN dalam Penyelesaian Konflik Myanmar-Rohingya dengan Five Point Consensus” maka penulis menggunakan penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Konflik Myanmar

Dari konflik tersebut organisasi-organisasi internasional ikut turun tangan untuk menyelesaikan dan mengakhiri konflik yang terjadi. Konflik ini menjadi perbincangan hangat bagi negara-negara yang terlibat dalam organisasi-organisasi internasional dan ikut serta dalam penyelesaian konflik tersebut. Secara garis besar salah satu organisasi internasional yang ikut menyelesaikan konflik tersebut adalah ASEAN. Sejak kudeta militer yang terjadi pada tahun 2021, rezim yang terjadi di Myanmar telah melakukan berbagai tindakan kejam seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pengusiran paksa yang telah terkategori sebagai genosida oleh beberapa organisasi internasional. Regim militer Myanmar yang dipimpin oleh Min Aung Hliang yang terjadi semenjak kudeta 1 Februari 2021, yang secara sistematis melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya. Sementara itu, kekerasan yang terjadi kepada Rohingya seperti pembakaran desa dan pemaksaan pengungsi yang melarikan diri kepada Bangladesh dituduhkan terhadap kelompok bersenjata Arakan Army (AA). Dari peristiwa tersebut beberapa komunitas internasional dan regional, salah satunya ASEAN melakukan upaya mendorong dialog dan gencatan senjata ditengah situasi yang tetap kritis dan membutuhkan perhatian serta tindakan segera untuk menghentikan penderitaan lebih lanjut bagi kelompok Rohingya.

4. 2 Peran Negara Anggota ASEAN

Beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN memberikan respon yang tidak mendukung Myanmar dan memilih untuk menyelesaikannya daripada harus , melalukan perang. Beberapa negara yang tergabung dalam ASEAN telah memberikan respons yang terbagi menjadi dua yaitu negara Indonesia, Singapura dan Malaysia cenderung mengecam pelanggaran Hak Asasi yang terjadi dan lebih mendukung solusi diplomatik, sedangkan Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam memilih untuk mendukung pemerintah Myanmar.

ASEAN telah berusaha untuk menjaga stabilitas regional melalui dialog dan bantuan kemanusiaan, namun hal ini belum mampu untuk menghentikan penyebab konflik yaitu Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Indonesia yang berperan aktif untuk mebanu menyelesaikan konflik melalui diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan pengungsian, Indonesia juga mendorong negara-negara lain termasuk anggota OKI untuk terlibat dalam penyelesaian konflik tersebut.

Sedangkan Singapura dan Malaysia lebih memilih untuk mengecam pelanggaran Hak Asasi Manusia dan mendukung upaya internasional dalam penyelesaian konflik tersebut. Sementara itu Thailand, Kamboja, Laos dan Vietnam lebih cenderung mendukung pemerintah Myanmar dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu stabilitas regional. Pada tahun 2023 Indonesia dan Laos sebagai ketua ASEAN, melakukan serangkaian dengan para Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, organisasi perlawanan etnis, partai politik, organisasi Rohingya, dan kelompok masyarakat lainnya yang membahas tentang pengukuran posisi umum diantara kelompok anti-junta sebelum pembicaraan di masa mendatang.

Beberapa negara anggota ASEAN memberikan respons terhadap konflik yang terjadi di Myanmar seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura. Sebagai anggota ASEAN yang paling aktif, Indonesia secara terus menerus menangani isu Rohingya dengan suara yang jelas. Bantuan kemanusiaan: Indonesia mengirimkan bantuan kepada para pengungsi Rohingya yang berada di Rakhine State, Myanmar, serta di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Peran organisasi keagamaan: Tokoh-tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut serta dalam misi kemanusiaan dan dialog antaragama guna mencegah konflik lebih lanjut.

Pemerintah Thailand berusaha menyeimbangkan antara keamanan dan kemanusiaan dalam menangani para migran ilegal yang berasal dari kelompok Rohingya. Sebagai negara asal dari konflik ini, Myanmar sering dikritik karena dianggap tidak cukup serius dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Meskipun beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia menunjukkan peran yang lebih aktif, secara keseluruhan ASEAN masih kesulitan mengambil langkah tegas secara kolektif dalam menangani isu yang terkait .

4. 3 Implementasi Five Point Consensus

Konflik yang terjadi di Myanmar menjadi salah satu tantangan besar bagi kredibilitas ASEAN sebagai salah satu organisasi Internasional yang sangat berperan besar di Asia Tenggara. Konflik yang terjadi di Myanmar sangat berpotensi untuk melemahkan keberadaan ASEAN jika tidak ditangani secara cepat dan tepat. Konflik ini juga dinggap melanggar piagam ASEAN yaitu prinsip perdamaian, patuh pada hukum internasional dan mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara damai dan perlindungan hak asasi manusia.

4. 4 Analisis Efektivitas ASEAN Dalam Implementasi Five Point Consensus

Peran ASEAN dalam menangani krisis Rohingya yang terjadi di Myanmar menunjukkan tantangan yang sangat signifikan terkait independensi organisasi internasional, terutama terkait dengan prinsip non-intervensi yang menjadi dasar kerjasama ASEAN. Dengan konteks yang terjadi terhadap Rohingya, prinsip ini telah membatasi kemampuan ASEAN untuk merespons secara efektif terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Myanmar. Namun, dengan adanya five point consensus ini beberapa negara anggota ASEAN seperti Malaysia dan Indonesia memilih untuk mengambil langkah yang lebih proaktif. Contohnya menteri Malaysia memaksa ASEAN untuk tidak diam dengan adanya kekerasan di Myanmar dan mengajukan untuk mendorong pendekatan yang lebih tegas tanpa melanggar prinsip non-intervensi. Independensi ASEAN sebagai salah satu organisasi Internasional yang diuji ketika prinsip non-intervensi berbenturan dengan kebutuhan untuk menanggapi krisis kemanusiaan. Beberapa kritik telah muncul yang menyatakan bahwa prinsip tersebut menjadi penghalang bagi ASEAN untuk mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Myanmar. Krisis Rohingya yang terjadi di Myanmar menyoroti keterbatasan ASEAN dalam menyeimbangkan prinsip non-intervensi untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Meskipun, beberapa upaya telah dilakukan untuk menanggapi krisis kemanusiaan tersebut, namun ASEAN dibatasi dengan prinsip-prinsip dasar yang telah dibuat. Untuk bisa meningkatkan respon terhadap krisis tersebut ASEAN bisa mempertimbangkan revisi terhadap prinsip non-intervensi atau untuk bisa mengembangkan mekanisme yang memungkinkan intervensi dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang sangat serius. Dan peran utusan khusus ASEAN yang menunjukkan adanya upaya untuk menciptakan mekanisme yang lebih efektif untuk menyelesaikan konflik, yang merupakan bagian dari norma dan prosedur dalam regime internasional.

KESIMPULAN

ASEAN melalui *Five Point Consensus* berusaha merespons krisis Myanmar–Rohingya, tetapi implementasinya belum efektif. Hambatan utama terletak pada prinsip non-intervensi, lemahnya komitmen junta, serta perbedaan sikap negara anggota. ASEAN hanya mampu menjalankan fungsi diplomasi tanpa mekanisme penegakan yang mengikat. Penelitian ini merekomendasikan agar ASEAN mempertimbangkan reformasi prinsip non-intervensi atau mengembangkan mekanisme baru yang memungkinkan intervensi dalam kasus pelanggaran HAM berat. Hal ini penting agar ASEAN dapat mempertahankan kredibilitasnya sebagai organisasi regional yang mampu menjaga perdamaian dan keamanan kawasan.

REFERENSI

- Assistance Association for Political Prisoners. (2022). Daily Briefing in Relation to the Military Coup. Retrieved October 9, 2022, from Assistance Association for Political Prisoners website: <https://aappb.org/?p=20349>
- Association of Southeast Asian Nations. (2021a). ASEAN Chairman's Statement on The Developments in The Republic of The Union of Myanmar. Retrieved October 3, 2022, from <https://asean.org/asean-chairmans-statement-on-the-developments-in-the-republic-of-the-union-of-myanmar-2/>
- Association of Southeast Asian Nations.(2021b). Chairman's Statement on the ASEAN Leaders' Meeting. Retrieved October 10, 2022, from Association of Southeast Asian Nations website: <https://asean.org/wp-content/uploads/Chairmans-Statement-on-ALM-Five-Point-Consensus-24-April-2021-FINAL-a-1.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations.(2022a). ASEAN-U.S. Special Summit, 2022 Joint Vision Statement.Retrieved October 8, 2022, from Association of Southeast Asian

- Nations website: <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/05/Final-ASEAN-US-Special-Summit-2022-Joint-Vision-Statement.pdf>
- Association of Southeast Asian Nations.(2022b). ASEAN Chairman's Statement on the Situation in Myanmar. Retrieved October 3, 2022,from <https://asean.org/asean-chairmans-statement-on-the-situation-in-myanmar/>
- Barnett, M., & Finnemore, M. (1999). The politics, power, and pathologies of international organizations. *International Organization*, 53(4), 699–732.
- Chayes, A., & Chayes, A. H. (1995). *The new sovereignty: Compliance with international regulatory agreements*. Harvard University Press.
- Cuyvers, L. (2019). The 'ASEAN Way' and ASEAN's development gap with Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam: a critical view. *Asia Pacific Business Review*, 25(5), 683–704. <https://doi.org/10.1080/13602381.2019.1652980>
- Deutsche Welle. (2021). KTT ASEAN 2021: Dialog Tidak Akan Cukup Menyelesaikan Konflik di Myanmar. Retrieved October 9, 2022, from Deutsche Welle website:<https://www.dw.com/id/dialog-tidak-akan-cukup-menyelesaikan-konflik-di-myanmar/a-57314791>
- Drechsler, W. (2021). New development: Myanmar's civil service—Responsible disobedience during the 2021 military coup. *Public Money and Management*,41(7),
- Human Rights Watch. (2021). Myanmar: Coup Leads to Crimes Against Humanity. Retrieved October 8, 2022, from Human Rights Watch website: <https://www.hrw.org/news/2021/07/31/myanmar-coup-leads-crimes-against-humanity>
- Human Rights Watch. (2022). Myanmar: Year of Brutality in Coup's Wake. Retrieved October 8, 2022, from Human Rights Watch website: <https://www.hrw.org/news/2022/01/28/myanmar-year-brutality-coups-wake>
- Iqbal, F. M., & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 113–129.<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.541>
- Kusumawardhana, I. (2022). Analisis Legalisasi Five Point Consensus ASEAN tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021. *Jurnal Hubungan Internasional*.
- Nadi, K. (2022). How ASEAN's Failed "Five-Point Consensus" Has Let Down the People of Myanmar. Retrieved October 9, 2022, from The Wire website: <https://thewire.in/south-asia/how-aseans-failed-five-point-consensus-has-let-down-the-people-of-myanmar>
- Nugraheny, D. E. (2021). ASEAN Leaders Meeting Bahas Nasib Myanmar, Pemimpin Junta Militer Hadir diJakarta? Retrieved October 9, 2022, from Kompas.com website:<https://nasional.kompas.com/read/2021/04/24/11284781/asean-leaders-meeting-bahas-nasib-myanmar-pemimpin-junta-militer-hadir-di>
- Putri, R. H., Nugraha, Y. C., & Akbar, A. (2022). The Role of the Asean Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) in Protecting Human Rights Related to the Coup Conflict in Myanmar. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(1), 7295–7305
- Putri Sandry, A. S. S. (2022). Pengaruh prinsip non-intervensi terhadap efektivitas Five Point Consensus ASEAN. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*.
- Rae, N. F. N. (2022). Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Yang Dilakukan Oleh Militer Pada Kudeta Militer Myanmar Menurut Hukum Ham Internasional. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Rijal, N. K. (2021). Peran ASEAN dalam menangani krisis kemanusiaan Myanmar melalui kesepakatan Five Point Consensus. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*.
- The Jakarta Post. (2021). Myanmar junta blames "foreign intervention" for ASEAN summit exclusion. Retrieved from The Jakarta Post

website:<https://www.thejakartapost.com/world/2021/10/17/myanmar-junta-blames-foreign-intervention-for-asean-summit-exclusion.html>

Widiastuti, A. (2020). Perspektif ASEAN terhadap prinsip non-intervensi. *Jurnal Hukum Internasional*.